

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa total bobot/skor untuk praktek akuntansi yang dijalankan oleh SKPD X adalah 780 sementara total bobot/skor untuk teori yang berlaku adalah 1.500 dengan penyimpangan sebesar -720 dengan demikian persentase penyimpangan negatif adalah sebesar 48,00%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan teori/dasar hukum yang berlaku sebesar 48,00%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses akuntansi yang diterapkan serta laporan keuangan yang disajikan belum sesuai sepenuhnya dengan standar akuntansi pemerintah serta undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri serta teori teori yang berlaku lainnya terkait dengan proses akuntansi pada SKPD.

Setelah penelitian dilakukan, diketahui bahwa penyimpangan penyimpangan terjadi pada jurnal umum, buku besar, buku besar pembantu, neraca saldo, daftar saldo buku pembantu, jurnal penyesuaian, neraca lajur, neraca, jurnal penutup dan jurnal balik dengan tingkat penyimpangan yang berbeda beda. Disisi lain untuk bukti transaksi, LRA dan CALK sudah disajikan dengan baik sehingga mendapatkan skor 100.

#### **1.2 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini:

1. Penelitian hanya dilakukan terhadap satu SKPD di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memungkinkan bahwa hasil penelitian belum mampu mewakili keadaan pada SKPD lainnya.
2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dimana data yang diperoleh dari data primer (data yang diperoleh langsung dari SKPD X), kemudian data yang diperoleh dianalisis berdasarkan peraturan dan teori yang berlaku. Dalam menganalisis, penulis merasa masih banyak terdapat kekurangan penulis dalam menganalisa bukti-bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan SKPD X.

### 1.3 Saran

Pemerintah sebaiknya menempatkan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD.

Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi yang baik dibidang akuntansi, atau dalam hal peningkatan kualitas pegawai yang sudah ada dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis serta memberikan informasi baru terkait dengan adanya perubahan perubahan dalam standar akuntansi pemerintah sehingga ilmu yang dikuasai oleh pegawai merupakan ilmu yang terus berkembang dan sesuai dengan kemajuan yang terjadi. Selain itu pengendalian serta pengawasan juga diperlukan oleh pihak pihak tertentu untuk memastikan bahwa rangkaian atau proses akuntansi yang dilaksanakan oleh pegawai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.